

Dominasi Politik Bangsawan dalam Pemerintahan Desa Dasan Lekong

M. Ramadhani^{1*}, Abdul Latif², Abdurrohman³

^{1,2,3}Universitas Hamzanwadi

Corresponding Author's e-mail : hajidan660@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2640 - 2654

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2564>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2564>

Article History:

Received: 02-06-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : This study aims to analyze the political dominance of the aristocratic group in the government of Dasan Lekong Village, Sukamulia District, East Lombok Regency, and to identify the factors that cause the reproduction of local elite power to persist over time. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. Informants were selected using a purposive sampling technique involving the village head, former village heads, community leaders, traditional leaders, youth leaders, village officials, and local community members. Data collection techniques were conducted through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis used an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the political dominance of the aristocratic group in Dasan Lekong Village is influenced by factors such as lineage, historical legitimacy, strong public trust, traditional cultural influence, economic capital, social capital, and symbolic domination possessed by the aristocratic group. The aristocrats are able to maintain their power through building public trust systems, establishing close social relations, implementing bureaucratic governance considered effective, and actively participating in traditional and social community activities. This dominance causes political power to be inherited continuously within certain elite groups, thereby limiting the opportunities for the amaq (commoner) group to obtain the position of village head. This study also finds that social stratification and culture have a major influence on village political dynamics. The community still perceives the aristocratic group as more worthy of leadership because they are considered to possess authority, charisma, and significant historical contributions to village development. As a result, village democracy tends to be less competitive because political choices are more influenced by social status and hereditary factors rather than the leadership quality of village head candidates. Thus, the political dominance of the aristocratic group in Dasan Lekong Village reflects the reproduction of local elite power maintained through social, cultural, and symbolic legitimacy within village society. Therefore, it is necessary to strengthen political education and broaden public participation in order to create a more democratic and inclusive village government.

Keywords: Political Dominance, Aristocracy, Local Elite, Social Stratification, Village Democracy.

Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dominasi politik golongan bangsawan dalam pemerintahan Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan reproduksi kekuasaan elite lokal terus bertahan dari masa ke masa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan melibatkan kepala desa, mantan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi politik bangsawan di Desa Dasan Lekong dipengaruhi oleh faktor keturunan, legitimasi sejarah, tingginya kepercayaan masyarakat, pengaruh budaya tradisional, modal ekonomi, modal sosial, dan dominasi simbolik yang dimiliki golongan bangsawan. Golongan bangsawan mampu mempertahankan kekuasaan melalui pembangunan sistem kepercayaan masyarakat, hubungan sosial yang erat, pelaksanaan birokrasi yang dianggap baik, serta keterlibatan dalam kegiatan adat dan sosial masyarakat. Dominasi tersebut menyebabkan kekuasaan politik cenderung diwariskan secara turun-temurun kepada kelompok elite tertentu sehingga peluang golongan amaq (jajar karang) untuk memperoleh jabatan kepala desa menjadi lebih terbatas. Penelitian ini juga menemukan bahwa stratifikasi sosial dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik desa. Masyarakat masih memandang bangsawan sebagai kelompok yang lebih layak menjadi pemimpin karena dianggap memiliki kewibawaan, kharisma, dan jasa besar dalam membangun desa. Akibatnya, demokrasi desa berjalan kurang kompetitif karena pilihan politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh status sosial dan faktor keturunan dibandingkan kualitas kepemimpinan calon kepala desa. Dengan demikian, dominasi politik bangsawan di Desa Dasan Lekong menunjukkan adanya reproduksi kekuasaan elite lokal yang dipertahankan melalui legitimasi sosial, budaya, dan simbolik dalam kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendidikan politik dan keterbukaan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih demokratis dan inklusif.

Keywords : Dominasi Politik, Bangsawan, Elite Lokal, Stratifikasi Sosial, Demokrasi Desa.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik, baik untuk memilih maupun dipilih sebagai pemimpin. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dijalankan secara langsung maupun melalui sistem perwakilan dalam pemilihan yang bebas dan adil. Prinsip utama demokrasi meliputi kesetaraan, kebebasan berpendapat, serta keterbukaan dalam menentukan pilihan politik tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun demikian, dalam praktiknya, nilai-nilai demokrasi tersebut tidak selalu berjalan secara ideal, terutama pada level lokal seperti desa. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal di Indonesia masih kerap dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan struktur kekuasaan tradisional yang telah mengakar kuat dalam masyarakat (Suryana & Mukhlison, 2025)

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah dominasi kelompok tertentu dalam struktur kekuasaan desa, seperti yang terjadi di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan realitas empiris, sejak awal penyelenggaraan pemerintahan desa hingga saat ini, kepemimpinan desa cenderung didominasi oleh kelompok bangsawan. Data menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Dasan Lekong telah berlangsung sebanyak delapan belas kali, dan seluruh kepala desa yang terpilih berasal dari golongan bangsawan. Kondisi ini mengindikasikan adanya pola dominasi kekuasaan yang berlangsung secara turun-temurun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa faktor keturunan atau status sosial masih menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan pilihan politik, dibandingkan dengan aspek kapasitas, kompetensi, dan kualitas kepemimpinan calon (Abdullah Muzakkar, n.d.)

Dominasi politik bangsawan ini berdampak pada terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk lebih memprioritaskan calon dari golongan bangsawan dalam setiap kontestasi Pilkades. (Nain & Sos, 2023) Di sisi lain, masyarakat dari golongan non-bangsawan (amaq/jajar karang) cenderung merasa kurang mendapatkan ruang yang setara dalam proses politik. Hal ini

berpotensi menimbulkan ketimpangan partisipasi politik serta memperlebar jarak sosial antar kelompok dalam masyarakat, seperti munculnya sikap eksklusivitas, miskomunikasi, hingga kecenderungan disintegrasi sosial. Selain itu, sebelum pelaksanaan Pilkades berlangsung, sebagian masyarakat telah memiliki preferensi politik yang didasarkan pada latar belakang keturunan calon. Ketika terdapat calon dari golongan bangsawan, peluangnya untuk terpilih cenderung lebih besar dibandingkan calon dari golongan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di tingkat desa masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang melekat kuat dalam struktur sosial masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan bangsawan dalam masyarakat Desa Dasan Lekong tidak dapat dilepaskan dari aspek historis dan kultural. Kelompok bangsawan memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan desa, yang tercermin dalam penggunaan gelar seperti Raden atau Mamiq serta kontribusi mereka dalam pembangunan sosial. Faktor historis dan simbolik ini memperkuat legitimasi sosial dan politik bangsawan di tengah masyarakat. Dalam perspektif sosiologi politik, legitimasi semacam ini sering menjadi modal utama dalam mempertahankan kekuasaan, terutama melalui mekanisme kultural dan simbolik. (Sudirman, 2026)

Meskipun demikian, dominasi yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi menghambat terwujudnya prinsip demokrasi yang ideal, khususnya dalam hal kesetaraan kesempatan dan partisipasi politik. Demokrasi yang sehat seharusnya memberikan ruang yang sama bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang sosial. Oleh karena itu, fenomena dominasi politik bangsawan di Desa Dasan Lekong menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna memahami bagaimana dominasi tersebut terbentuk, dipertahankan, serta memengaruhi dinamika sosial dan politik masyarakat setempat.

Kajian mengenai hubungan antara stratifikasi sosial dan kekuasaan politik telah banyak dilakukan dalam studi sosiologi politik kontemporer. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa struktur sosial tradisional masih memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik politik lokal, khususnya di wilayah pedesaan. Elite lokal sering mempertahankan kekuasaan melalui legitimasi kultural dan simbolik, serta relasi patron-klien yang mengakar dalam masyarakat (Sukmana et al., 2025). Namun demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik mengaitkan dominasi politik bangsawan dengan praktik pemerintahan desa secara empiris dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan pada peran bangsawan sebagai elite tradisional dalam struktur politik desa, menganalisis konteks lokal Desa Dasan Lekong, serta menggabungkan perspektif sosiologi politik dan kearifan lokal dalam menjelaskan reproduksi kekuasaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian mengenai oligarki dan elite lokal, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana struktur sosial tradisional tetap relevan dan berpengaruh dalam sistem demokrasi modern di tingkat lokal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena dominasi politik bangsawan dalam pemerintahan Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual serta menekankan makna yang dibangun oleh subjek penelitian (Romdani & Zubair, n.d.).

(Tsani & Sukmana, 2025) Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena dominasi politik golongan bangsawan dalam jabatan kepala desa yang berlangsung sejak

dahulu hingga sekarang. Penelitian ini dilaksanakan melalui observasi langsung terhadap kondisi sosial masyarakat dan proses kehidupan politik desa.

(Sukmana *et al.*, 2025) Pemilihan responden atau informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, mantan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta masyarakat Desa Dasan Lekong yang dianggap memiliki informasi terkait dominasi politik bangsawan dalam pemerintahan desa. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis, kamera, dan telepon genggam sebagai alat dokumentasi serta perekam suara saat melakukan wawancara. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian yang berkaitan dengan dominasi politik bangsawan, reproduksi kekuasaan elite lokal, pengaruh stratifikasi sosial, dan dinamika demokrasi desa. Alat dokumentasi digunakan untuk mendukung pengumpulan data lapangan berupa foto, rekaman wawancara, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta aktivitas politik yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dominasi politik bangsawan tetap bertahan dalam pemerintahan desa. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, arsip, data sejarah kepala desa, foto kegiatan, serta berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar data lebih mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil interpretasi data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya.

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai dominasi politik bangsawan, reproduksi kekuasaan elite lokal, serta pengaruh stratifikasi sosial dan budaya terhadap dinamika politik di Desa Dasan Lekong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Potret Dominasi Politik Bangsawan Dalam Pemerintahan Desa Dasan Lekong

Berdasarkan data sejarah kepemimpinan Desa Dasan Lekong, terlihat bahwa jabatan kepala desa sejak tahun 1723 hingga sekarang didominasi oleh keturunan golongan bangsawan. Dari sembilan belas kali pergantian kepemimpinan kepala desa, sebagian besar jabatan tersebut dipegang oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan bangsawan dengan gelar seperti Raden,

Lalu, dan Mamiq. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan politik di Desa Dasan Lekong memiliki pola yang bersifat turun-temurun dan cenderung mempertahankan dominasi kelompok elite tertentu dalam pemerintahan desa.

Dominasi politik bangsawan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sejarah, tetapi juga oleh kuatnya budaya masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Dalam pandangan masyarakat, khususnya generasi tua, golongan bangsawan dianggap memiliki legitimasi sosial untuk menjadi pemimpin karena diyakini memiliki kewibawaan, kharisma, pengalaman, serta keturunan yang dianggap pantas memimpin masyarakat. Kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat bahwa kepemimpinan desa seolah-olah memang layak berada di tangan kaum bangsawan. (Hastira *et al.*, 2025)

Selain faktor budaya, dominasi politik bangsawan juga diperkuat melalui penggunaan simbol-simbol sosial dan sejarah. (Sudirman, 2026) Masyarakat Desa Dasan Lekong masih mengingat bahwa wilayah desa pada masa dahulu dipelopori dan dipertahankan oleh para bangsawan. Narasi sejarah tersebut kemudian menjadi simbol legitimasi politik yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, masyarakat memiliki kecenderungan untuk memberikan dukungan politik kepada calon kepala desa yang berasal dari golongan bangsawan dibandingkan golongan amaq atau jajar karang.

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori dominasi simbolik dari Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, dominasi simbolik terjadi ketika kelompok yang berkuasa mampu mempertahankan kekuasaannya melalui simbol, nilai, budaya, dan cara berpikir yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Dalam konteks Desa Dasan Lekong, golongan bangsawan berhasil membangun pengaruh melalui status sosial, gelar kebangsawanan, kewibawaan, serta kekuatan ekonomi yang dimiliki. Dominasi tersebut diterima masyarakat sebagai sesuatu yang normal sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa telah terjadi ketimpangan dalam akses kekuasaan politik. (Marbun, 2021)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam situasi doxa, yaitu keadaan ketika nilai dan kepercayaan yang berkembang diterima begitu saja tanpa adanya sikap kritis. Masyarakat menganggap bahwa bangsawan memang lebih pantas menjadi pemimpin desa dibandingkan golongan biasa. Hal ini menyebabkan peluang golongan amaq atau jajar karang untuk memperoleh kekuasaan politik menjadi lebih kecil karena adanya pengaruh sosial dan budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, dominasi bangsawan juga diperkuat oleh kepemilikan modal ekonomi dan modal sosial. Sebagian besar golongan bangsawan memiliki kemampuan finansial, jaringan sosial, dan pengaruh yang lebih besar di tengah masyarakat. Faktor tersebut menjadi kekuatan tambahan dalam proses pemilihan kepala desa karena masyarakat sering menilai calon pemimpin berdasarkan tingkat ekonomi, pengaruh keluarga, serta kemampuan memberikan bantuan kepada masyarakat. Dengan demikian, dominasi politik bangsawan di Desa Dasan Lekong bukan hanya terjadi karena faktor keturunan, tetapi juga karena adanya kombinasi antara legitimasi budaya, simbol sosial, kekuatan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat yang terus dipertahankan hingga saat ini.

2. Kekuatan Kekuasaan Politik Bangsawan di Desa Dasan Lekong

Kekuatan kekuasaan politik golongan bangsawan di Desa Dasan Lekong tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Dominasi politik tersebut terlihat dari keberhasilan golongan bangsawan dalam mempertahankan jabatan kepala desa sejak dahulu hingga sekarang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik di Desa Dasan Lekong masih sangat dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional yang menempatkan golongan bangsawan sebagai kelompok elite dalam masyarakat.

Salah satu faktor utama yang memperkuat kekuasaan politik bangsawan adalah faktor keturunan dan legitimasi sosial. Dalam pandangan masyarakat Desa Dasan Lekong, golongan bangsawan dianggap memiliki hak dan kelayakan lebih untuk menjadi pemimpin dibandingkan golongan amaq atau jajar karang. Status kebangsawanan yang diwariskan turun-temurun menjadikan mereka memiliki kedudukan sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Akibatnya, masyarakat memandang bangsawan sebagai kelompok yang berwibawa, terhormat, dan pantas menduduki posisi penting dalam pemerintahan desa.

Selain faktor keturunan, sejarah perjuangan para tokoh bangsawan dalam membangun dan mempertahankan desa juga menjadi faktor penting yang memperkuat dominasi politik mereka. Masyarakat masih mengingat jasa-jasa para bangsawan yang dahulu berperan dalam memperjuangkan wilayah desa serta membangun fasilitas sosial dan keagamaan. (Basundoro *et al.*, 2025) Ingatan kolektif tersebut kemudian membentuk rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap golongan bangsawan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap mendukung keturunan bangsawan dalam setiap pemilihan kepala desa.

Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tradisional juga menjadi faktor pendukung kuatnya kekuasaan politik bangsawan. Pengaruh golongan tua dalam kehidupan sosial masyarakat masih sangat besar, terutama dalam menentukan pilihan politik. Orang tua dan tokoh masyarakat sering menjadi rujukan dalam menentukan siapa yang layak dipilih menjadi kepala desa. Karena sejak dahulu golongan bangsawan dianggap berjasa dan berpengaruh, maka pandangan tersebut terus diwariskan kepada generasi muda sehingga membentuk pola pikir kolektif bahwa kepala desa seharusnya berasal dari kalangan bangsawan.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori dominasi simbolik dari Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, dominasi dapat dipertahankan melalui simbol-simbol sosial yang diterima secara wajar oleh masyarakat tanpa adanya paksaan secara langsung. (Riyadi *et al.*, n.d.) Dalam konteks Desa Dasan Lekong, simbol-simbol seperti gelar kebangsawanan, kewibawaan, kharisma, serta citra sebagai keturunan tokoh berjasa menjadi alat yang memperkuat posisi politik bangsawan. Masyarakat menerima dominasi tersebut sebagai sesuatu yang normal sehingga tanpa disadari mereka ikut mempertahankan kekuasaan golongan bangsawan.

Kekuatan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan kekuasaan politik bangsawan. Sebagian besar golongan bangsawan memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dibandingkan masyarakat biasa. Modal ekonomi tersebut digunakan untuk membangun pengaruh sosial, membantu masyarakat, serta mendukung aktivitas politik dalam pemilihan kepala desa. Dalam beberapa kasus, dukungan materi seperti bantuan sosial maupun pemberian tertentu kepada masyarakat menjadi strategi untuk menarik simpati pemilih. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan politik tidak hanya dipengaruhi oleh status sosial, tetapi juga oleh kekuatan ekonomi yang dimiliki calon pemimpin.

Selain itu, golongan bangsawan juga memiliki kemampuan dalam membangun hubungan sosial dan jaringan politik yang kuat. Mereka aktif terlibat dalam berbagai kegiatan adat, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan seperti resepsi adat, gotong royong, dan kegiatan keagamaan. Kedekatan sosial tersebut menciptakan hubungan emosional antara bangsawan dan masyarakat sehingga memperkuat dukungan politik terhadap mereka. Tidak hanya itu, jaringan dengan instansi pemerintahan dan tokoh-tokoh berpengaruh juga menjadi modal penting dalam memperlancar program pembangunan desa.

Pelaksanaan administrasi dan birokrasi pemerintahan desa yang dianggap baik turut memperkuat legitimasi politik bangsawan. Selama menjabat sebagai kepala desa, golongan bangsawan dinilai mampu menjalankan pemerintahan secara tertib, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Program-program pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial, membuat masyarakat semakin percaya terhadap kepemimpinan bangsawan. Keberhasilan tersebut kemudian menjadi alasan bagi masyarakat untuk terus memilih golongan bangsawan dalam pemilihan kepala desa.

Di sisi lain, kekuasaan politik bangsawan juga diperkuat oleh kemampuan mereka dalam menguasai struktur pemerintahan desa. Kepala desa memiliki kewenangan dalam menentukan perangkat desa dan menjalankan program-program pemerintahan selama masa jabatan berlangsung. Kondisi ini memungkinkan terbentuknya jaringan kekuasaan yang saling mendukung sehingga posisi bangsawan dalam struktur pemerintahan desa menjadi semakin kuat dan sulit digantikan oleh golongan lain.

Dengan demikian, kuatnya kekuasaan politik bangsawan di Desa Dasan Lekong merupakan hasil dari perpaduan berbagai faktor, seperti legitimasi keturunan, pengaruh sejarah, kepercayaan masyarakat, dominasi simbolik, kekuatan ekonomi, hubungan sosial, serta penguasaan birokrasi pemerintahan desa. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem kekuasaan yang terus mempertahankan dominasi golongan bangsawan dalam pemerintahan desa hingga saat ini.

3. Dampak Dominasi Politik Bangsawan terhadap Demokrasi dan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dominasi politik golongan bangsawan di Desa Dasan Lekong memberikan berbagai dampak terhadap proses demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat. Dominasi yang berlangsung secara turun-temurun tidak hanya mempengaruhi sistem politik desa, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial, cara berpikir masyarakat, serta kesempatan masyarakat dalam memperoleh kekuasaan politik. Dampak tersebut dapat dilihat dari sisi positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat desa.

Dalam aspek demokrasi, dominasi politik bangsawan menyebabkan proses demokrasi berjalan kurang kompetitif. Meskipun secara formal pemilihan kepala desa dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, pada kenyataannya peluang golongan *amaq* atau *jajar karang* untuk memenangkan pemilihan masih sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh sosial dan budaya yang menganggap bahwa jabatan kepala desa lebih pantas dipimpin oleh golongan bangsawan. Akibatnya, demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat menjadi terbatas oleh konstruksi sosial yang telah mengakar sejak lama.

Dominasi tersebut juga menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan politik. Kekuasaan cenderung berputar pada kelompok tertentu sehingga masyarakat dari golongan biasa mengalami kesulitan untuk masuk dalam struktur kekuasaan desa. Kondisi ini dapat menghambat munculnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki kemampuan dan potensi, tetapi tidak berasal dari keturunan bangsawan. Dalam jangka panjang, keadaan tersebut dapat memunculkan budaya politik yang tertutup dan memperkuat praktik elite politik lokal dalam pemerintahan desa.

Selain itu, dominasi politik bangsawan turut mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap kepemimpinan. Sebagian masyarakat menjadi terbiasa menilai pemimpin berdasarkan keturunan, gelar sosial, dan status keluarga dibandingkan kemampuan, kualitas pendidikan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki calon kepala desa. (Ruruh Aris Setyawibawa, 2025) Fenomena ini

menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat masih dipengaruhi oleh pola tradisional dan simbolik. Dalam perspektif teori dominasi simbolik Pierre Bourdieu, masyarakat secara tidak sadar menerima dominasi tersebut sebagai sesuatu yang wajar sehingga sulit membangun sikap kritis terhadap sistem kekuasaan yang ada.

Di sisi lain, dominasi politik bangsawan juga memiliki dampak sosial yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Dasan Lekong. Salah satu dampak positifnya adalah terciptanya stabilitas sosial dan hubungan sosial yang relatif harmonis. Kepercayaan masyarakat terhadap golongan bangsawan membuat masyarakat lebih mudah mematuhi kebijakan pemerintah desa dan menjaga hubungan sosial antarwarga. Selain itu, golongan bangsawan sering terlibat dalam kegiatan adat, keagamaan, dan sosial masyarakat sehingga mempererat hubungan antara pemimpin dan masyarakat.

Namun demikian, dominasi tersebut juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara golongan bangsawan dan golongan *amaq* atau *jajar karang*. Perbedaan status sosial yang masih kuat dalam masyarakat dapat memunculkan rasa inferior dari kelompok masyarakat biasa karena merasa kurang memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik dan pemerintahan. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan stratifikasi sosial yang terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat desa.

Dampak lainnya adalah munculnya ketergantungan masyarakat terhadap figur bangsawan dalam menentukan arah pembangunan desa. Masyarakat cenderung menyerahkan keputusan politik kepada kelompok elite tertentu tanpa adanya partisipasi aktif dan sikap kritis dalam proses demokrasi. Akibatnya, partisipasi politik masyarakat menjadi kurang berkembang karena masyarakat hanya mengikuti pola pilihan politik yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Meskipun demikian, dominasi politik bangsawan tidak selalu dipandang negatif oleh masyarakat Desa Dasan Lekong. Sebagian masyarakat menilai bahwa golongan bangsawan memiliki pengalaman, jaringan sosial, kemampuan ekonomi, dan pengaruh yang dapat membantu pembangunan desa. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap bangsawan masih tetap bertahan hingga sekarang.

Dengan demikian, dominasi politik bangsawan di Desa Dasan Lekong memberikan dampak yang kompleks terhadap demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, dominasi tersebut mampu menciptakan stabilitas sosial dan mempertahankan hubungan sosial yang harmonis, tetapi di sisi lain juga membatasi keterbukaan demokrasi, mempersempit peluang kelompok lain dalam memperoleh kekuasaan, serta mempertahankan stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat desa.

B. Pembahasan

1. Politik Keturunan dan Reproduksi Kekuasaan Elite Lokal

Politik keturunan merupakan salah satu fenomena yang masih berkembang dalam sistem politik lokal di Indonesia, terutama pada masyarakat yang masih memiliki ikatan sosial tradisional yang kuat. Dalam konteks Desa Dasan Lekong, politik keturunan terlihat dari dominasi golongan bangsawan dalam jabatan kepala desa yang berlangsung sejak dahulu hingga sekarang. Kekuasaan politik yang terus diwariskan kepada kelompok tertentu menunjukkan adanya reproduksi kekuasaan elite lokal yang dipertahankan melalui pengaruh sosial, budaya, ekonomi, dan simbolik dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena reproduksi kekuasaan elite lokal tersebut menunjukkan bahwa proses demokrasi di tingkat desa tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pemilihan secara formal, tetapi juga oleh struktur sosial yang telah mengakar dalam masyarakat. (Harahap & Handoko, 2026) Masyarakat Desa Dasan Lekong cenderung memberikan kepercayaan kepada calon pemimpin yang berasal

dari keturunan bangsawan karena dianggap memiliki legitimasi sosial, kewibawaan, dan pengalaman dalam memimpin masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kekuasaan politik lebih mudah diwariskan kepada kelompok elite tertentu dibandingkan kepada masyarakat dari golongan biasa atau amaq (jajar karang).

Dominasi politik bangsawan juga diperkuat oleh memori kolektif masyarakat terhadap jasa-jasa para tokoh bangsawan di masa lalu. Golongan bangsawan dianggap sebagai kelompok yang berjasa dalam mempertahankan, membangun, dan memimpin desa sejak zaman dahulu. Narasi sejarah tersebut kemudian menjadi modal sosial yang terus diwariskan dari generasi ke generasi sehingga membentuk keyakinan masyarakat bahwa kepemimpinan desa memang layak berada di tangan bangsawan. Kepercayaan masyarakat yang terus dipertahankan inilah yang kemudian melahirkan reproduksi kekuasaan elite lokal secara berulang.

Dalam perspektif teori dominasi simbolik Pierre Bourdieu, kekuasaan dapat dipertahankan melalui simbol-simbol sosial yang diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajar. Golongan bangsawan di Desa Dasan Lekong menggunakan modal simbolik berupa gelar kebangsawanan, kharisma, kewibawaan, dan citra sebagai keturunan tokoh berjasa untuk mempertahankan pengaruh politiknya. Menurut Bourdieu, dominasi simbolik terjadi ketika masyarakat menerima struktur kekuasaan tanpa adanya paksaan langsung karena dominasi tersebut telah dianggap sebagai bagian normal dalam kehidupan sosial.

Selain modal simbolik, reproduksi kekuasaan elite lokal juga didukung oleh modal ekonomi dan jaringan sosial yang dimiliki golongan bangsawan. Sebagian besar golongan bangsawan memiliki kemampuan finansial yang lebih baik sehingga mampu membangun pengaruh sosial di tengah masyarakat. Modal ekonomi tersebut digunakan untuk membantu masyarakat, mendukung kegiatan sosial, serta membangun hubungan politik dalam proses pemilihan kepala desa. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan politik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kekuatan ekonomi dan jaringan sosial yang dimiliki oleh elite lokal.

pilihan politik masyarakat sering dipengaruhi oleh hubungan keluarga, kerabat, dan kedekatan emosional. Seorang responden mengaku memilih karena mengikuti arahan anggota keluarga yang menjadi tim sukses salah satu calon. (Sholeh *et al.*, 2025) Dominasi politik bangsawan di Desa Dasan Lekong tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan dan status sosial, tetapi juga oleh kuatnya hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Perilaku pemilih di masyarakat pedesaan cenderung dipengaruhi oleh kedekatan emosional dan hubungan keluarga. Kondisi ini menyebabkan dukungan politik sering diberikan kepada calon yang memiliki hubungan sosial yang dekat dengan masyarakat. Dalam konteks Desa Dasan Lekong, jaringan kekerabatan yang dimiliki golongan bangsawan menjadi modal sosial yang memperkuat peluang mereka untuk terus memperoleh dukungan politik dalam setiap pemilihan kepala desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga pada ikatan emosional dan hubungan kekeluargaan yang telah terbangun sejak lama.

Di sisi lain, kuatnya politik keturunan dalam pemerintahan desa berdampak terhadap kualitas demokrasi lokal. Demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat menjadi kurang kompetitif karena peluang masyarakat biasa untuk memperoleh kekuasaan politik lebih terbatas. Masyarakat cenderung memilih pemimpin berdasarkan faktor keturunan, status sosial, dan pengaruh keluarga dibandingkan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki calon kepala desa. Akibatnya, kekuasaan politik hanya berputar pada kelompok tertentu dan mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat secara luas.

Fenomena politik keturunan dan dominasi elite lokal sebenarnya masih menjadi perdebatan dalam kehidupan politik Indonesia. Sebagian masyarakat menilai bahwa politik dinasti atau politik

keturunan dapat menghambat demokrasi karena melanggar kekuasaan kelompok elite tertentu. Diskusi masyarakat mengenai politik dinasti di Indonesia juga menunjukkan adanya pandangan bahwa kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun berpotensi melahirkan praktik nepotisme dan ketimpangan kekuasaan politik.

Namun demikian, dalam konteks Desa Dasan Lekong, sebagian masyarakat justru memandang dominasi bangsawan sebagai sesuatu yang positif karena dianggap mampu menjaga stabilitas sosial dan kesinambungan pemerintahan desa. Golongan bangsawan dinilai memiliki pengalaman, pengaruh, jaringan sosial, serta kemampuan dalam menjalankan pemerintahan desa sehingga masyarakat masih memberikan legitimasi politik kepada mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa reproduksi kekuasaan elite lokal tidak hanya dipertahankan melalui kekuasaan formal, tetapi juga melalui persetujuan sosial dari masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, politik keturunan dan reproduksi kekuasaan elite lokal di Desa Dasan Lekong merupakan hasil dari perpaduan antara legitimasi sejarah, budaya masyarakat tradisional, modal simbolik, modal ekonomi, serta pengaruh sosial yang dimiliki golongan bangsawan. Struktur sosial tersebut menyebabkan kekuasaan politik terus diwariskan kepada kelompok elite tertentu sehingga dominasi bangsawan tetap bertahan dalam pemerintahan desa hingga saat ini.

2. Pengaruh Stratifikasi Sosial dan Budaya terhadap Politik Desa

Stratifikasi sosial dan budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan politik di tingkat desa, terutama pada masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti di Desa Dasan Lekong. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu berdasarkan status sosial, keturunan, kekayaan, pendidikan, maupun kehormatan. Dalam kehidupan masyarakat desa, stratifikasi sosial sering kali membentuk hubungan kekuasaan dan menentukan siapa yang dianggap layak menjadi pemimpin dalam pemerintahan desa. (Putri & Adilah, 2025)

Dalam konteks politik desa, stratifikasi sosial menyebabkan adanya perbedaan kedudukan antara golongan bangsawan dan golongan masyarakat biasa atau *amaq* (jajar karang). Golongan bangsawan ditempatkan pada posisi sosial yang lebih tinggi karena dianggap memiliki keturunan terhormat, pengaruh sosial, dan sejarah kepemimpinan yang kuat di tengah masyarakat. Kedudukan sosial tersebut kemudian mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menentukan pilihan politik, terutama dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada calon pemimpin yang berasal dari golongan bangsawan dibandingkan golongan biasa karena dianggap lebih pantas dan berwibawa untuk memimpin desa.

Budaya masyarakat tradisional juga menjadi faktor yang memperkuat pengaruh stratifikasi sosial terhadap politik desa. Nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun membentuk keyakinan bahwa kepemimpinan sebaiknya berada di tangan kelompok tertentu yang dianggap memiliki legitimasi sosial dan historis. Dalam masyarakat Desa Dasan Lekong, budaya menghormati bangsawan masih sangat kuat sehingga masyarakat menjadikan status keturunan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam memilih pemimpin desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki peran penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat.

Selain itu, pengaruh budaya juga terlihat dalam hubungan sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, dan nilai kekeluargaan. Tokoh bangsawan biasanya memiliki posisi yang dihormati dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan sehingga keberadaan mereka semakin dekat dengan masyarakat. Kedekatan sosial tersebut menjadi modal penting dalam memperoleh dukungan politik pada saat pemilihan kepala desa berlangsung.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori dominasi simbolik dari Pierre Bourdieu yang menjelaskan bahwa kekuasaan dapat dipertahankan melalui simbol, budaya, dan cara berpikir masyarakat. Dalam konteks Desa Dasan Lekong, gelar kebangsawanan, kewibawaan, dan sejarah keluarga menjadi simbol sosial yang diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajar. Masyarakat tanpa sadar menerima dominasi tersebut karena telah tertanam dalam budaya dan kehidupan sosial mereka sejak lama.

Pengaruh stratifikasi sosial dan budaya terhadap politik desa juga berdampak pada proses demokrasi lokal. Demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat menjadi kurang terbuka karena adanya dominasi kelompok tertentu dalam struktur kekuasaan desa. Masyarakat dari golongan biasa sering merasa memiliki peluang yang kecil untuk menjadi pemimpin desa apabila masih ada calon dari golongan bangsawan yang mencalonkan diri. Akibatnya, kompetisi politik menjadi tidak sepenuhnya berdasarkan kemampuan dan kualitas individu, tetapi dipengaruhi oleh status sosial dan faktor keturunan.

Di sisi lain, stratifikasi sosial dan budaya juga memiliki dampak positif dalam kehidupan politik desa. Kepercayaan masyarakat terhadap golongan bangsawan dapat menciptakan stabilitas sosial dan menjaga hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Masyarakat merasa lebih mudah menerima kebijakan pemerintah desa karena adanya rasa hormat terhadap pemimpin yang berasal dari golongan bangsawan. Selain itu, budaya gotong royong dan hubungan kekeluargaan yang masih kuat juga membantu menciptakan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat desa.

Namun demikian, apabila stratifikasi sosial terlalu kuat dipertahankan, kondisi tersebut dapat mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat dan memperkuat dominasi elite lokal dalam pemerintahan desa. Kekuasaan yang hanya berputar pada kelompok tertentu berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan membatasi kesempatan masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam proses politik desa.

Dengan demikian, stratifikasi sosial dan budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap politik desa. Struktur sosial masyarakat dan nilai budaya yang berkembang tidak hanya menentukan pola kepemimpinan desa, tetapi juga membentuk cara masyarakat memandang kekuasaan, memilih pemimpin, serta mempertahankan dominasi kelompok tertentu dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, politik desa tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya dan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

3. Tantangan mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif

Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan politik di tingkat lokal. Pemerintahan desa yang demokratis pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan desa. (Setiawan, 2026) Sementara itu, pemerintahan yang inklusif berarti memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa membedakan status sosial, keturunan, ekonomi, maupun latar belakang budaya. Namun dalam praktiknya, berbagai faktor sosial dan budaya sering menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang benar-benar terbuka dan partisipatif.

Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya pengaruh stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat desa. Pada masyarakat yang masih mempertahankan struktur sosial tradisional, seperti di Desa Dasan Lekong, status sosial dan keturunan masih menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pemimpin desa. Golongan bangsawan sering dianggap lebih layak menjadi kepala desa dibandingkan masyarakat biasa atau golongan *amaq* (jajar karang).

Akibatnya, kesempatan masyarakat dari golongan biasa untuk memperoleh kekuasaan politik menjadi lebih terbatas. Kondisi ini menyebabkan demokrasi desa berjalan kurang kompetitif karena kekuasaan cenderung berputar pada kelompok elite tertentu.

Selain stratifikasi sosial, budaya politik tradisional juga menjadi tantangan dalam membangun pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif. Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa kepemimpinan harus diwariskan kepada kelompok tertentu yang dianggap memiliki legitimasi sosial dan historis. Budaya menghormati bangsawan serta tingginya pengaruh tokoh-tokoh tua dalam masyarakat membuat pilihan politik masyarakat sering dipengaruhi oleh faktor keturunan dan hubungan sosial dibandingkan kapasitas atau kualitas calon pemimpin. Hal ini menyebabkan proses demokrasi belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip kesetaraan politik.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi desa. Sebagian masyarakat masih bersikap pasif dan cenderung mengikuti pilihan kelompok mayoritas atau tokoh berpengaruh tanpa melakukan penilaian kritis terhadap calon pemimpin. Dalam perspektif teori dominasi simbolik Pierre Bourdieu, kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima struktur kekuasaan yang ada sebagai sesuatu yang wajar sehingga sulit membangun sikap kritis terhadap dominasi elite lokal.

Di sisi lain, faktor ekonomi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang inklusif. Dalam proses pemilihan kepala desa, calon yang memiliki modal ekonomi lebih besar cenderung memiliki peluang yang lebih kuat untuk memperoleh dukungan masyarakat. (Kayupa *et al.*, 2025) Kemampuan memberikan bantuan sosial, membangun jaringan, serta mendanai kegiatan politik sering menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Akibatnya, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi meskipun memiliki kemampuan dan kualitas kepemimpinan yang baik, sering mengalami kesulitan untuk bersaing dalam politik desa.

Kurangnya pendidikan politik masyarakat juga menjadi tantangan penting. Pendidikan politik yang rendah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi. Masyarakat sering memilih pemimpin berdasarkan hubungan emosional, keturunan, atau pengaruh sosial tanpa mempertimbangkan visi, kemampuan, dan program kerja calon kepala desa. Kondisi ini dapat menghambat lahirnya kepemimpinan desa yang lebih profesional dan terbuka terhadap perubahan.

Selain itu, praktik reproduksi kekuasaan elite lokal turut menjadi hambatan dalam menciptakan pemerintahan desa yang inklusif. Kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun kepada kelompok tertentu menyebabkan ruang partisipasi politik masyarakat lain menjadi semakin sempit. Struktur kekuasaan yang tertutup dapat memunculkan ketimpangan sosial dan menghambat regenerasi kepemimpinan di tingkat desa.

Namun demikian, upaya mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif tetap dapat dilakukan melalui berbagai langkah. Salah satunya adalah meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar masyarakat lebih kritis dalam menentukan pilihan politik. Selain itu, pemerintah desa perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial dan latar belakang keturunan. Transparansi pemerintahan, penguatan kelembagaan desa, serta keterlibatan generasi muda dalam proses pembangunan desa juga menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis.

Dengan demikian, tantangan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif tidak hanya berasal dari sistem politik formal, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan pola pikir masyarakat yang masih mempertahankan dominasi kelompok elite tertentu. Oleh karena itu, diperlukan perubahan sosial dan pendidikan politik yang

berkelanjutan agar demokrasi desa dapat berjalan lebih terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dominasi politik golongan bangsawan di Desa Dasan Lekong merupakan bentuk reproduksi kekuasaan elite lokal yang telah berlangsung sejak dahulu hingga sekarang. Dominasi tersebut terlihat dari jabatan kepala desa yang sebagian besar selalu dipimpin oleh golongan bangsawan dalam setiap periode pemilihan kepala desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem politik desa masih sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial, budaya tradisional, serta legitimasi sejarah yang berkembang di tengah masyarakat.

Kekuatan politik bangsawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor keturunan, pengaruh sejarah, tingginya kepercayaan masyarakat, modal ekonomi, modal sosial, serta kemampuan membangun hubungan sosial dengan masyarakat. Selain itu, golongan bangsawan juga mampu mempertahankan kekuasaan melalui simbol-simbol sosial seperti kewibawaan, kharisma, dan citra sebagai kelompok yang berjasa dalam membangun serta mempertahankan desa. Dalam perspektif teori dominasi simbolik Pierre Bourdieu, masyarakat menerima dominasi tersebut sebagai sesuatu yang wajar sehingga kekuasaan bangsawan terus bertahan dalam kehidupan politik desa.

Dominasi politik bangsawan memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positifnya adalah terciptanya stabilitas sosial, hubungan sosial yang harmonis, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun di sisi lain, dominasi tersebut menyebabkan proses demokrasi desa menjadi kurang kompetitif karena kesempatan masyarakat dari golongan biasa atau amaq (jajar karang) untuk memperoleh kekuasaan politik menjadi lebih terbatas. Akibatnya, kekuasaan politik cenderung hanya berputar pada kelompok elite tertentu.

Stratifikasi sosial dan budaya tradisional juga memiliki pengaruh besar terhadap politik desa. Status sosial dan faktor keturunan masih menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan pemimpin desa. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih pemimpin berdasarkan latar belakang sosial dibandingkan kemampuan dan kualitas kepemimpinan yang dimiliki calon kepala desa.

Dengan demikian, mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif masih menjadi tantangan dalam kehidupan politik Desa Dasan Lekong. Diperlukan perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan pendidikan politik, serta keterbukaan dalam sistem pemerintahan desa agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam proses politik tanpa memandang status sosial maupun keturunan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Dasan Lekong diharapkan lebih terbuka dan kritis dalam menentukan pilihan politik, sehingga pemilihan kepala desa tidak hanya didasarkan pada faktor keturunan atau status sosial, tetapi juga berdasarkan kemampuan, integritas, pendidikan, dan kualitas kepemimpinan calon kepala desa.
2. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar masyarakat memahami pentingnya demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga desa.

3. Golongan bangsawan sebagai elite lokal diharapkan tetap menjaga hubungan sosial yang baik dengan masyarakat dan menjalankan pemerintahan secara adil, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan tanpa membedakan golongan sosial.
4. Pemerintah desa perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas kepada seluruh masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan desa agar tercipta pemerintahan desa yang lebih demokratis dan inklusif.
5. Masyarakat diharapkan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang positif, namun tidak menjadikan stratifikasi sosial sebagai penghambat bagi masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik desa.
6. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai politik desa, dominasi elite lokal, dan stratifikasi sosial dengan pendekatan teori yang lebih luas agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik lokal di masyarakat pedesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan artikel ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa Dasan Lekong, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian. Tanpa bantuan dan keterbukaan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan artikel ini.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam kajian politik lokal, dominasi elite, dan demokrasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muzakkar, M. (n.d.). EFEKTIVITAS PARTISIPASI PERANGKAT DESA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DASAN LEKONG. -.
- Basundoro, P., Husain, S. B., Jauhari, E., Sartini, N. W., Arimbi, D. A., WuIan, N., & Manuaba, I. B. P. (2025). *PERUBAHAN BUDAYA DI INDONESIA-Perspektif Sejarah, Linguistik, dan Sastra*. Airlangga University Press.
- Harahap, R. A., & Handoko, T. (2026). POLITIK DINASTI DALAM KEPEMIMPINAN DESA DI INDONESIA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 13(4), 435–448.
- Hastira, M., Pratama, G., Astuti, W., & Zahir, M. (2025). Kekuasaan Dalam Tradisi: Kajian Dinasti Politik di Desa Banrimanurung Kabupaten Jeneponto. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 17(2),

105–115.

- Kayupa, O. O., Guampe, F., Hengkeng, J., & Balo, M. J. (2025). Tantangan dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa di Indonesia. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 6(1), 187–199.
- Marbun, R. (2021). Dominasi Simbolik Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Pierre-Felix Bourdieu. *Esensi Hukum*, 3(1), 20–40.
- Nain, U., & Sos, S. (2023). *Sosiologi Kekuasaan Desa: Kontestasi dalam Arena Pemilihan Kepala Desa-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Putri, V. H., & Adilah, S. (2025). STRATIFIKASI SOSIAL DAN PENDIDIKAN. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 298–311.
- Riyadi, I., Kom, M. I., & Ilmiawan, S. P. (n.d.). *SEMIOTIKA POLITIK*.
- Romdani, M. R., & Zubair, M. (n.d.). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DI DESA DASAN LEKONG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR*.
- Ruruh Aris Setyawibawa, M. M. (2025). *Rivalitas Politik Dinasti*. umsu press.
- Setiawan, A. (2026). *Pemerintahan Desa*. Deepublish.
- Sholeh, N., Abdurrohman, A., Istiqlal, L. M., & Zulkarnain, Z. (2025). Perilaku Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Pulau Maringkik, Lombok Timur. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 8(2), 102–114.
<https://doi.org/10.29408/sosedu.v8i2.30544>
- Sudirman, H. (2026). *PEJANGGIK DALAM SEJARAH NUSANTARA: Kejayaan, Konflik, dan Keruntuhan Sebuah Kerajaan Besar di Lombok*.
- Sukmana, O., Nasution, M. A., Thamrin, H., Damanik, F. H. S., Lakum, L., Arrozy, A., Susilo, J., Ilham, M., Lairing, N., & Prihartini, I. (2025). *Pengantar Sosiologi*. Star Digital Publishing.
- Suryana, D. D., & Mukhlison, B. A. N. (2025). Konsep Negara Demokrasi Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Change Think Journal*, 4(01), 58–80.
- Tsani, M., & Sukmana, O. (2025). Eksistensi Trah Keluarga dalam Pilkades di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(3), 690–704.